

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1981, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi Dan kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BPHN), 2015, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, BPHN Kemenkumham, Jakarta.
- Bungi, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Chandra, Yonatan Iskandar, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Effendi, Sofian dan Tukiran, 2014, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Garnasih, Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, cetakan ke-3, Rajawali Pers, Jakarta.
- Greenberg, Theodore S., et al., 2009, *Stolen Asset Recovery : a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*, The World Bank, Washington DC.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Husein, Yunus, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.
- \_\_\_\_\_, et al., 2003, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, et al., 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Ichsan, Achmad, 1967, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Liley, Peter, 2005, *Transaksi Kotor : Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional Dan*

- Terorisme*, (Penyunting : Bestari Kuswolo), CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manthovani, Reda dan Jatna, R. Narendra, 2018, “*Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*”, UAI Press, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teori Dan Praktek)*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyana, Asep N., 2018, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Natabaya, HAS, 2008, *Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Nazir, Moh., 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- PPATK, 2010, *Modul 2: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, PPATK, Jakarta.
- PPATK dan Setjen DPR RI, 2011, *Buku Satu : Memorie Van Toelichting ‘Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’*, PPATK, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramelan, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- \_\_\_\_\_, *et al.*, 2008, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta.

- Renggong, Ruslan, 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik Khusus di Luar KUHP*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan Buku Keempat)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, N.T.H., 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala Penerbit, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suparni, *et al.*, 2017, *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Penerbit Miswar, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E., 1965, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, PT. Penerbit Universitas, Bandung.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi-Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor : Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi 2000) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 711).

### C. Karya Ilmiah

Asnawi, 2016, "Penerapan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Perampasan Aset di Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli, 2016, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

Azzahra, Afra, 2012, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Fajarwati, Meirina, 2017, "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017.

Garnasih, Yenti, 2004, "Konsep Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang", *Makalah* Pada Lokakarya Terbatas Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan oleh *Center for Legal Studies* kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Graha Niaga, Jakarta, 5 dan 6 Mei 2004.

Halif, 2016, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Jember.

Hiariej, Eddy O.S, 2013, "Pengembalian Aset Kejahatan", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13, Mei-Agustus 2013.

Husein, Yunus, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2004.

\_\_\_\_\_, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 7 No.4, Desember 2010.

Illahi, Beni Kurnia dan Alia, Muhammad Ikhsan, 2017, “Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, *Jurnal UBELAJ*, Volume 2 Number 2, Oktober 2017

Khairoza, Onneri, 2012, “Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Nugroho, Hibnu *et al*, 2016, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Aset, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 1, Maret 2016.

Prayogo, R. Tony, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang “, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.

Puspapertiwi, Sheiffi, 2016, “Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian 40+9 Rekomendasi FATF”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5 Edisi 1, April 2016.

Refki saputra, 2017, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Jurnal Integritas*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.

Sadeli, Wahyudi Hafiludin, 2010, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Sudarto, “Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1995.



Wattimena, Husin, “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XII, No. 2, Desember 2016.

#### D. Internet

Ascarya, 2003, “Kelembagaan Bank Indonesia”, <https://www.researchgate.net/publication/304783009>, diakses 21 Mei 2020.

Detiknews, 2014, “Harta 'Tak Bertuan' Diduga Hasil Kejahatan Kini Dapat Dirampas Buat Negara”, <https://news.detik.com/berita/d-2496640/harta-tak-bertuan-diduga-hasil-kejahatan-kini-dapat-dirampas-buat-negara>, diakses 27 April 2020.

\_\_\_\_\_, 2015, “Suami Istri Pelaku 'Nigerian Scam' Ini Tipu Wanita WNI Rp 600 Juta”, <https://news.detik.com/berita/d-3102287/suami-istri-pelaku-nigerian-scam-ini-tipu-wanita-wni-rp-600-juta>, diakses 30 April 2020.

FATF, “FATF 40 Recommendations October 2003 (incorporating all subsequent amendments until October 2004)”, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf>, diakses 3 April 2020.

Hakim, Lukmanul dan Martin, Abraham Yazdi, 2015, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, [https://www.researchgate.net/publication/277668808\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PENCUCIAN\\_UANG\\_DAN\\_MODUSNYA\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_BISNIS](https://www.researchgate.net/publication/277668808_TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG_DAN_MODUSNYA_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_BISNIS), diakses 1 Januari 2020.

Hukum online, 2014, “Ahli: Aturan Penetapan Tersangka Multitafsir”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c3fad8094e5/ahli--aturan-penetapan-terseangka-multitafsir>, diakses 10 April 2020.

Husein, Yunus, 2007, “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, [https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33\\_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan\\_x.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan_x.pdf), diakses 30 Desember 2019.

IMF, 2003, “Buku Pedoman tentang IMF”, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf>, Diakses 30 Maret 2020

Kabar24.com, 2015, “Tipu WNI Rp647 Juta, Pria Nigeria Ini Dibekuk Polisi”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20151222/367/504262/tipu>



*wni-rp647-juta-pria-nigeria-ini-dibekuk-polisi*, diakses 30 April 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanpa tahun, “Harta”, <https://kbbi.web.id/harta>, diakses 16 Juni 2020.

Kurnia, Abi Jam'an, 2019, “Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca4c04f2ca1e/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan>, diakses 2 Mei 2020

Ramelan, tanpa tahun, “Pembahasan Rancangan Undang - Undang Tentang Perampasan Aset”, [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/842\\_bahan%20ramelan.pdf](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/842_bahan%20ramelan.pdf), diakses 27 Desember 2019.

*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, [http://www.unodc.org/pdf/convention\\_1988\\_en.pdf](http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf), diakses 30 Desember 2019.

Widiartana, G., tanpa tahun, “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana”, <https://ojs.uaajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/1418/1096>, diakses 4 Februari 2020.